



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan keuangan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan

kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 82.B/LHP/XVIII.TJP/04/2024 tanggal 26 April 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Batam, 26 April 2024

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Penanggung Jawab Pemeriksaan,


Emmy Mutiarini, S.P., M.Si., Ak., CA, CSFA, ACPA
Register Negara Akuntan No. 2891

1. LAPORAN KEUANGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF CALK	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023 (AUDITED)	(%)	REALISASI 2022
1	PENDAPATAN-LRA					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) -LRA	7.5.1.1.1.				
3	Pajak Daerah - LRA	7.5.1.1.1.1	1.545.528.271.857,00	1.631.489.164.580,00	105,56	1.492.764.323.921,00
4	Retribusi Daerah - LRA	7.5.1.1.1.2	17.158.831.254,00	12.203.621.186,00	71,12	6.856.067.413,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA	7.5.1.1.1.3	18.300.000.000,00	2.449.330.649,00	13,38	2.490.319.871,00
6	Lain-lain PAD yang Sah - LRA	7.5.1.1.1.4	129.031.109.899,00	160.830.717.090,31	124,64	173.619.177.874,95
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LRA (3 s.d 6)		1.710.018.213.010,00	1.806.972.833.505,31	105,67	1.675.729.889.079,95
8	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	7.5.1.1.2.				
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA					
10	Dana Perimbangan-LRA	7.5.1.1.2.1	2.376.107.401.438,00	2.355.098.796.904,00	99,12	2.190.992.844.534,00
11	Dana Insentif Daerah (DID) -LRA	7.5.1.1.2.2	6.693.745.000,00	6.693.745.000,00	100,00	50.148.653.000,00
12	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA (10 s.d 11)		2.382.801.146.438,00	2.361.792.541.904,00	99,12	2.241.141.497.534,00
13	Jumlah Pendapatan Transfer - LRA (12)		2.382.801.146.438,00	2.361.792.541.904,00	99,12	2.241.141.497.534,00
14	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	7.5.1.1.3.				
15	Pendapatan Hibah - LRA		1.278.720.000,00	1.278.720.000,00	100,00	1.265.040.000,00
16	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA (15)		1.278.720.000,00	1.278.720.000,00	100,00	1.265.040.000,00
17	JUMLAH PENDAPATAN - LRA (7+13+16)		4.094.098.079.448,00	4.170.044.095.409,31	101,86	3.918.136.426.613,95
18	BELANJA					
19	BELANJA OPERASI	7.5.1.2.1.				
20	Belanja Pegawai	7.5.1.2.1.1	1.131.987.999.352,00	1.100.521.283.967,05	97,22	1.016.168.582.813,00
21	Belanja Barang dan Jasa	7.5.1.2.1.2	1.439.819.111.176,00	1.405.114.292.589,86	97,59	1.360.825.303.379,12
22	Belanja Bunga	7.5.1.2.1.3	9.100.000.000,00	8.623.436.793,00	94,76	664.047.335,00
23	Belanja Subsidi	7.5.1.2.1.4	5.139.750.000,00	4.143.883.000,00	80,62	0,00
24	Belanja Hibah	7.5.1.2.1.5	381.759.531.133,00	362.326.208.341,06	94,91	238.079.765.086,02
25	Belanja Bantuan Sosial	7.5.1.2.1.6	8.113.624.000,00	7.417.430.000,00	91,42	3.801.986.143,00
26	Jumlah Belanja Operasi (20 s.d 25)		2.975.920.015.661,00	2.888.146.534.690,97	97,05	2.619.539.684.756,14
27	BELANJA MODAL	7.5.1.2.2.				
28	Belanja Modal Tanah	7.5.1.2.2.1	1.550.000.000,00	1.388.489.184,00	89,58	7.673.736.567,00
29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.5.1.2.2.2	209.987.380.531,00	202.847.528.770,05	96,60	162.641.344.361,67
30	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.5.1.2.2.3	261.455.707.771,00	232.962.878.105,59	89,10	186.083.529.219,00
31	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.1.2.2.4	184.375.202.898,00	178.551.126.080,95	96,84	191.690.062.740,38
32	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.5.1.2.2.5	552.134.268,00	529.474.380,00	95,90	4.073.089.480,00
33	Belanja Modal Aset Lainnya	7.5.1.2.2.6	2.782.759.143,00	2.597.940.118,00	93,36	0,00
34	Jumlah Belanja Modal (28 s.d 33)		660.703.184.611,00	618.877.436.638,59	93,67	552.161.762.368,05
35	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.5.1.2.3.				
36	Belanja Tidak Terduga		6.960.777.665,00	2.413.029.129,00	34,67	0,00
37	Jumlah Belanja Tidak Terduga (36)		6.960.777.665,00	2.413.029.129,00	34,67	0,00
38	BELANJA TRANSFER	7.5.1.2.4.				
39	Belanja Bagi Hasil		780.468.095.864,00	759.191.867.087,00	97,27	652.632.186.014,00
40	Belanja Bantuan Keuangan		8.400.000.000,00	8.352.581.914,00	99,44	18.252.778.838,00
41	Jumlah Belanja Transfer (39 s.d 40)		788.868.095.864,00	767.544.449.001,00	97,30	670.884.964.852,00
42	JUMLAH BELANJA (26+34+37+41)		4.432.452.073.801,00	4.276.981.449.459,56	96,49	3.842.586.411.976,19
43	SURPLUS/DEFISIT (17-42)		(338.353.994.353,00)	(106.937.354.050,25)	31,61	75.550.014.637,76
44	PEMBIAYAAN	7.5.1.3.				
45	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
46	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		388.950.302.882,00	388.950.302.882,49	100,00	170.514.470.170,73
47	Penerimaan Pinjaman Daerah		16.556.292.010,00	15.431.239.382,00	93,20	142.781.194.269,00
48	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	37.172.817,00	0,00	104.623.805,00
49	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (46 s.d 48)		405.506.594.892,00	404.418.715.081,49	99,73	313.400.288.244,73
50	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
51	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		67.152.600.539,00	66.266.646.018,00	98,68	0,00
52	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		67.152.600.539,00	66.266.646.018,00	98,68	0,00
53	PEMBIAYAAN NETTO (49-52)		338.353.994.353,00	338.152.069.063,49	99,94	313.400.288.244,73

NO	URAIAN	REFF CALK	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023 (AUDITED)	(%)	REALISASI 2022
54	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (43+53)	7.5.1.4.	0,00	231.214.715.013,24	0,00	388.950.302.882,49

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.